

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan yang sering dihadapi oleh negara berkembang dalam upaya membangun perekonomian, salah satunya adalah kemiskinan. Menurut hasil survei Badan Pusat Statistik tercatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2015 mencapai 28,59 juta orang (11,22%). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada september 2014, maka selama enam bulan tersebut terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 0,86 juta orang. Sementara apabila dibandingkan dengan Maret tahun 2014 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan sebanyak 0,31 juta orang (BPS, 2015).

Tabel 1.1
Jumlah dan Persentase penduduk Miskin
Menurut Daerah, Maret 2014-Maret 2015

| Daerah/Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang) | Persentase Penduduk Miskin |
|--------------------|--|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Perkotaan | | |
| Mar-14 | 10,51 | 8,34 |
| Sep-14 | 10,36 | 8,16 |
| Mar-15 | 10,65 | 8,29 |
| Perdesaan | | |
| Mar-14 | 17,77 | 14,17 |
| Sep-14 | 17,37 | 13,76 |
| Mar-15 | 17,94 | 14,21 |
| perkotaan+Pedesaan | | |
| Mar-14 | 28,28 | 11,25 |
| Sep-14 | 27,73 | 10,96 |
| Mar-15 | 28,59 | 11,22 |

Sumber: BPS 2015

Tabel 1.1 memperlihatkan data jumlah penduduk miskin berdasarkan daerah tempat tinggal pada periode September 2014-Maret 2015, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami kenaikan sebesar 0,29 juta sedangkan daerah perdesaan mengalami kenaikan sebesar 0,57 juta orang.

Pada table 1.2 diperoleh jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta tahun 2014-2015. Dalam data tersebut terlihat Garis kemiskinan pada Maret 2015 adalah Rp 335.886,- per kapita per bulan. Jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2014 yang garis kemiskinannya sebesar Rp 313.452,- per kapita per bulan, terjadi kenaikan sebesar 7,16 persen dan jika dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang besarnya Rp 321.056,- per kapita per bulan, maka tampak adanya kenaikan garis kemiskinan sebesar 4,62 persen. Terjadinya peningkatan garis kemiskinan ini sejalan dengan terjadinya inflasi Maret 2014 ke Maret 2015 yang sebesar 5,13 persen, serta inflasi September 2014 - Maret 2015 yang mencapai 3,06 persen.

Table 1.2
Garis Kemiskinan Daerah Yogyakarta
Tahun 2014-2015

| Daerah/Tahun | Garis kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) | | |
|--------------|------------------------------------|---------------|---------|
| | Makanan | Bukan Makanan | Total |
| Perkotaan | | | |
| Mar-14 | 227 691 | 99 582 | 327 273 |
| Sep-14 | 230 329 | 103 232 | 333 561 |
| Mar-15 | 238 042 | 109 745 | 347 787 |
| Perdesaan | | | |
| Mar-14 | 220 412 | 65 742 | 286 137 |
| Sep-14 | 227 233 | 69 196 | 296 429 |

| | | | |
|--------------------|---------|--------|---------|
| Mar-15 | 236 342 | 75 907 | 312 249 |
| perkotaan+Pedesaan | | | |
| Mar-14 | 225 245 | 88 207 | 313 452 |
| Sep-14 | 229 286 | 91 770 | 321 056 |
| Mar-15 | 237 473 | 98 413 | 335 886 |

Sumber: BPS

Kemiskinan akan menjadi ancaman yang serius di masa yang akan datang jika hal tersebut dibiarkan dan tidak mendapat perhatian khusus. Yahya et.al (2010) dalam Garry (2011: 1) kemiskinan erat kaitannya dengan ketimpangan distribusi pendapatan, tidak meratanya distribusi pendapatan akan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan.

Dalam hal mengatasi masalah kesenjangan distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan tersebut pengembangan usaha produktif seperti UMKM dapat menjadi solusi tepat, karena UMKM dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik tradisional maupun moderen (Tambunan, 2012). Setiawan (2011) dalam Wulansari (2013: 3) dengan memberikan pinjaman dalam bentuk *micro credit* merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan, hal ini didasarkan bahwa masyarakat miskin terbagi pada beberapa klasifikasi yaitu: pertama, masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) adalah mereka yang tidak yang berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, kedua, masyarakat dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan ketiga masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) mereka

yang berpenghasilan namun tidak banyak. Dalam pemberian bantuan, lebih diprioritaskan kepada orang miskin yang termasuk dalam kelompok *near poor* yang merupakan orang miskin yang masih memiliki kegiatan produktif tetapi termasuk kelompok yang susah dalam mengakses modal dan ketika terjadi gejolak ekonomi, kelompok ini adalah yang paling rentan terkena dampaknya. Kelompok miskin golongan *near poor* lebih diprioritaskan dalam pemberian bantuan agar dapat mengembangkan usahanya. Mengembangkan kelompok usaha ini secara riil strategis, setidaknya dilihat beberapa alasan yaitu: 1) mereka telah mempunyai kegiatan ekonomi produktif sehingga kebutuhannya adalah pengembangan dan peningkatan kapasitas bukan penumbuhan, sehingga lebih mudah dan pasti; 2) apabila kelompok ini diberdayakan secara tepat, mereka akan secara mudah berpindah menjadi sektor usaha kecil; 3) secara efektif mengurangi kemiskinan yang diderita oleh mereka sendiri, maupun membantu penanganan rakyat miskin kategori fakir miskin, serta usia lanjut dan muda.

Telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah guna mendukung kegiatan usaha produktif masyarakat ini dengan memberikan bermacam kebijakan, dan program-program seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun mengingat terbatasnya anggaran untuk bantuan modal usaha dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan menyebabkan tidak memungkinkan untuk semua dapat terlayani. Untuk

itu, diperlukan sumber pendanaan lainnya yang bisa membantu upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini.

Zakat sesungguhnya memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan sebagai solusi dalam masalah pendanaan dalam membantu mengembangkan usaha masyarakat menengah kebawah, dikarenakan indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama muslim sehingga diharapkan potensi ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin guna merealisasikan pengentasan kemiskinan. Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Didin Hafidhuddin dalam Antara News.com menyatakan potensi zakat Indonesia mencapai Rp 200 triliun lebih dan ini dapat membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan (Antara News.com, 29 Juli 2015).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang amat vital dalam pembangunan kesejahteraan umat Islam. Zakat memiliki hikma yang dapat dikategorikan dalam dua dimensi: dimensi vertikan dan dimensi horizontal. Dalam hal ini, zakat menjadi perwujudan dari ketundukan (*'ibadah*) seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari ungkapan solidaritas-kepedulian sosial (*ibadah sosial*). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya dengan Allah (*hablun min Allah*) dan hubungan sesama manusia (*hablun min annas*). Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat (Asnaini, 2008).

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 yang berisi pedoman teknis pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pada awalnya dana ZIS terutama zakat lebih sering digunakan dalam hal pemenuhan kebutuhan konsumtif untuk keperluan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari namun saat ini pendistribusian dana zakat sampai pada zakat sebagai sumber dana produktif yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian.

Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik dengan cara produktif. Zakat produktif diberikan untuk modal usaha, agar dengan usahanya itu mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat (Asnaini, 2008). Secara teoritis, ekonomi mustahik diberdayakan secara produktif biasanya mustahik sudah memiliki usaha sendiri atau walaupun pada awalnya tidak memiliki usaha sendiri maka dengan program pembinaan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga para mustahik didorong untuk memiliki usaha sendiri sehingga mampu menopang kehidupannya dimasa yang akan datang.

Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dana masyarakat dan mendistribusikannya kembali. BAZNAS merupakan salah satu lembaga yang telah banyak membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun kesehatan. Dalam program yang membantu

masyarakat dengan zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewah Yogyakarta mempunyai Program Rumah Makmur BAZNAS yang dimana dana zakat produktif disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal untuk usaha yang sedang dijalankan, atau diberikan sebagai modal untuk membuat suatu usaha yang diharapkan nanti dapat membantu hidup mereka kedepannya.

Dari adanya realistik empirik tentang praktik sosial berupa distribusi dana zakat produktif inilah yang menjadi ketertarikan penulis lebih lanjut untuk melakukan kajian mengenai “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Mustahik (Studi Kasus di Rumah Zakat Yogyakarta) ”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah jumlah dana zakat yang disalurkan berpengaruh pada peningkatan pendapatan mustahik?
2. Apakah lembaga pengelola zakat memiliki pengaruh terhadap peningkatan pendapatan mustahik?
3. Apakah tingkat pendidikan mustahik berpengaruh pada peningkatan pendapatan mustahik?
4. Apakah usia mustahik berpengaruh pada peningkatan pendapatan mustahik?
5. Apakah motivasi berpengaruh pada peningkatan pendapatan mustahik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis seberapa besar pengaruh jumlah dana zakat yang diterima mustahik terhadap peningkatan pendapatan setelah menerima zakat.
- b. Menganalisis seberapa besar pengaruh lembaga pengelola zakat yang memberikan pendampingan, pengawasan, dan pelatihan terhadap peningkatan pendapatan mustahik.
- c. Menganalisis pengaruh latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh mustahik terhadap peningkatan pendapatannya setelah menerima zakat.
- d. Menganalisis seberapa besar pengaruh usia mustahik terhadap peningkatan pendapatannya setelah menerima zakat modal usaha.
- e. Menganalisis seberapa besar pengaruh motivasi terhadap peningkatan pendapatan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan, serta acuan bagi semua pihak yang membutuhkan guna pengembangan lebih lanjut.

b. Kegunaan Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi BAZNAS Daerah Istimewah Yogyakarta,

dengan menjadikan penelitian ini sebagai solusi untuk mengetahui faktor yang dapat membantu meningkatkan pendapatan mustahik.

D. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab atau bagian yaitu BAB I: Pendahuluan, BAB II: Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori, BAB III: Metode Penelitian, BAB IV: Hasil dan Pembahasan, BAB V: Penutup.

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika pembahasan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi yaitu berupa artikel ilmiah, hasil penelitian maupun buku.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya; jenis penelitian, desain, lokasi, definisi konsep dan variabel, serta analisis data yang digunakan.

4. BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi: (1) Hasil Penelitian. Klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya. (2) Pembahasan, Sub bahasan (1) dan (2) dapat

digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

5. BAB V: PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisi dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.